

**PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS**

2023



**Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Tahun 2023**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**

Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Kode Pos 59311

Telp (0291) 438152 Faks (0291) 435030

Email : dinkes@kuduskab.go.id

Website : dinkes.kuduskab.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
B. Issue Strategis dan Permasalahan.....	7
C. Sistematika.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	14
B. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
B. Analisis Capaian Kinerja.....	29
C. Realisasi Anggaran.....	58
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi.....	63
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan.....	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan.....	14
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan RPJMD	15
Tabel 2.3 Indikator Kinerja SPM	15
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Kudus Tahun 2023	16
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas	16
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan dan SDK	17
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	17
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ..	18
Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Sub Koordinator di Bidang Pelayanan dan SDK.....	18
Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Sub Koordinator di Bidang Kesehatan Masyarakat.....	19
Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja Sub Koordinator di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	20
Tabel 2.12 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023.....	21
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	27
Tabel 3.2 Capaian Kinerja terhadap Target RKPD dan RPJMD	28
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	28
Tabel 3.4 Realisasi Tujuan,Sasaran,Indikator Kinerja Utama	30
Tabel 3.5 Status Capaian Kinerja terhadap Target RKPD dan RPJMD	34
Tabel 3.6 Status Capaian Kinerja terhadap SPM	35
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama	36
Tabel 3.8 Perbandingan Status Capaian terhadap Target Akhir RPJMD	37
Tabel 3.9 Perbandingan 4 Tahun Terakhir Status Capaian Kinerja.....	38
Tabel 3.10 Perbandingan 1 Tahun Terakhir Status Capaian Kinerja RPJMD.....	39
Tabel 3.11 Realisasi Program	40
Tabel 3.12 Realisasi Kegiatan.....	41

Tabel 3.13 Realisasi Sub Kegiatan.....	45
Tabel 3.14 Analisis dan Solusi terhadap Capaian Kinerja Tahun 2022.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Dinas Kesehatan	6

DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 3.1 Pohon Masalah Lintas OPD.....	8
Diagram 3.1 Angka Kematian Ibu Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023	31

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun *outcome*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kudus.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Kudus, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. ANDINI ARI DEWI, M.Kes

Pembina Tingkat 1

NIP.197310082005012009

BAB I PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang terdiri dari :

1. 1 (satu) Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian;
2. 3 (tiga) Bidang dan masing-masing bidang sebanyak 3 (tiga) subkoordinator

Selain itu terdapat UPTD berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 19 UPTD dan 1 (satu) , namun sejak tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Kudus nomor 70 Tahun 2020 tentang Pembentukan , Kedudukan, Susunsn Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menjadi 19 UPTD Puskesmas dan 1 (satu) UPT Laboratorium Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
2. Penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
3. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
4. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
5. Pengendalian dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
6. Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
7. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
8. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
9. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- 1). Subbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
- 2). Subbag Umum dan Kepegawaian

Adapun fungsi dari bagian sekretariat adalah :

- 1). Perumusan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
- 2). Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 3). Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- 4). Pengelolaan organisasi dan tata laksana Dinas.
- 5). Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat meliputi gizi masyarakat dan kesehatan keluarga, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olah Raga dan Kesehatan Kerja.

Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- 1). Sub koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi
- 2). Sub koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
- 3). Sub koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olah Raga dan Kesehatan Kerja

Adapun fungsi dari bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah :

- 1). Perumusan perencanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- 2). Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- 3). Pengkoordinasian tugas di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

- 4). Pembinaan, fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat; dan
- 5). Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah melaksanakan sebagian fungsi kepala Dinas dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengendalian penyakit meliputi pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa, surveylan dan Imunisasi serta Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Bidang Pengendalian Penyakit Terdiri dari :

- 1). Sub koordinator surveillance dan Imunisasi
- 2). Sub koordinator Pengendalian Penyakit Menular
- 3). Sub koordinator Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Adapun fungsi bidang Pengendalian Penyakit adalah :

- 1). Perumusan perencanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 2). Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 3). Pengkoordinasian tugas di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 4). Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan;
- 5). Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

4. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi kepala Dinas dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan pengendalian kegiatan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi perijinan, sertifikasi, farmasi, perbekalan kesehatan, manajemen informasi, dan pengembangan kesehatan serta Pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

- 1). Sub koordinator Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan

- 2). Sub koordinator Perbekalan dan Alat Kesehatan
- 3). Sub koordinator SDK, Perijinan, Sertifikasi dan Manajemen Informatika

Adapun Fungsi bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan adalah :

- 1). Perumusan perencanaan program dan kegiatan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- 2). Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- 3). Pengkoordinasian tugas di bidang Pelayanan dan Sumber Daya kesehatan;
- 4). Pembinaan, fasilitasi dan Pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- 5). Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas

UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan terdiri dari 19 UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- 1). Penyusunan program rencana kerja dan kegiatan untuk rencana anggaran satuan kerja UPTD Puskesmas;
- 2). Pelayanan pengobatan, rawat inap, rawat jalan dan laboratorium;
- 3). Pelayanan kesehatan ibu, anak dan usia lanjut serta KB;
- 4). Pelayanan dan peningkatan gizi masyarakat;
- 5). Pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta imunisasi;
- 6). Pelayanan kesehatan khusus;
- 7). Pelaksanaan pelayanan rujukan;
- 8). Perawatan kesehatan masyarakat;
- 9). Penyuluhan kesehatan masyarakat, pembinaan peran serta masyarakat dan kesehatan kerja;
- 10). Penyehatan lingkungan;
- 11). Pembinaan dan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- 12). Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan;
- 13). Penyiapan bahan dan sarana pelayanan kesehatan;
- 14). Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta barang daerah;
- 15). Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

UPT Labkesda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, UPT laboratorium kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1). Penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan untuk rencana anggaran satuan kerja UPT Laboratorium Kesehatan;
- 2). Pengambilan dan pemeriksaan spesimen penyakit secara mikroskopis, mikrobiologi dan klinik;
- 3). Pengambilan dan pemeriksaan spesimen air, tanah, udara dan limbah secara fisik, kimia dan mikrobiologi;
- 4). Pelaksanaan pelayanan rujukan laboratorium;
- 5). Penyiapan bahan dan sarana pelayanan laboratorium;
- 6). Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta barang daerah;
- 7). Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT laboratorium kesehatan.

7. Jabatan Fungsional

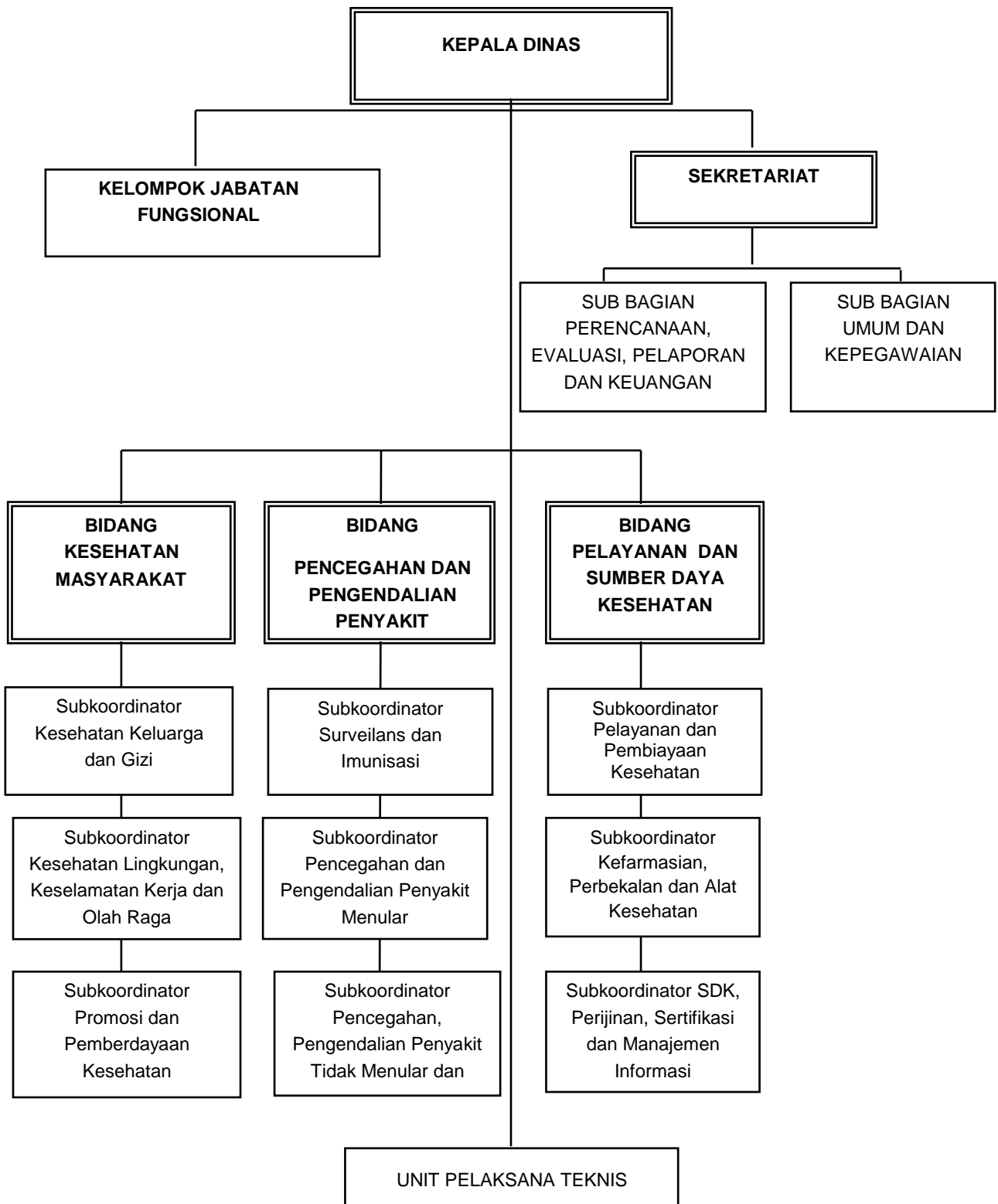
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menunjang tugas pokok Dinas, sedangkan fungsinya sebagai berikut:

- 1). Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- 2). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
- 3). Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- 4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan bagan organisasi Dinas Kesehatan dapat digambarkan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**



Gambar 1.1 Struktur organisasi Dinas kesehatan Kabupaten Kudus

B. ISSUE STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1. Tantangan dan Peluang

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan antara lain:

- a. Adanya agenda global Sustainable Development Goals bidang kesehatan
- b. Adanya transisi epidemiologi dimana kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat dan akan terus meningkat seiring dengan pola hidup yang tidak sehat (diet tidak sehat dan seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, minum alkohol beserta stress).
- c. Adanya beban ganda permasalahan gizi yaitu bukan hanya masalah gizi kurang dan gizi buruk saja tetapi juga masalah gizi lebih, kegemukan atau obesitas.

Sedangkan peluang merupakan faktor pendorong yang berasal dari eksternal Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus didalam melaksanakan tugas dan fungsi. Beberapa peluang yang teridentifikasi saat ini dan masih ada dimasa yang akan datang antara lain:

- a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus yang mendukung program kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen tinggi dalam mendukung pembangunan kesehatan, hal ini dibuktikan melalui dukungan kebijakan pembangunan akses, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, penganggaran program kesehatan dan dukungan dalam mendorong partisipasi secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

- b. Adanya dukungan dari lintas sektoral, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan. Seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kudus pada umumnya sangat mendukung Program Pembangunan Kesehatan. Kesadaran akan kesehatan dan partisipasi aktif dalam program kesehatan telah terwujud pada sebagian besar masyarakat.
- c. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya menerapkan pola hidup sehat.
- d. Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kudus yaitu Puskesmas, Rumah Sakit baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta, Klinik, Dokter Praktek Mandiri dan Praktek Mandiri Bidan.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Swasta sangat berkembang pesat di Kabupaten Kudus. Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mampu menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Selain itu pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dikembangkan berbagai macam inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan juga pelaksanaan akreditasi baik itu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer.

- e. Adanya dukungan dan bantuan pembiayaan Pemerintah Pusat dalam upaya pengembangan program kesehatan

Dalam pelaksanaan program dan pengembangan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mendapatkan banyak dukungan dan bantuan pembiayaan antara lain dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus, BOK Tambahan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Pajak Rokok

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi masalah dan akar masalah di Dinas Kesehatan dimulai dari masalah pokok belum optimalnya capaian kinerja program kesehatan masyarakat, program pencegahan dan pengendalian penyakit. Serta lintas sektor , seperti pada diagram pohon masalah lintas OPD sebagai berikut :

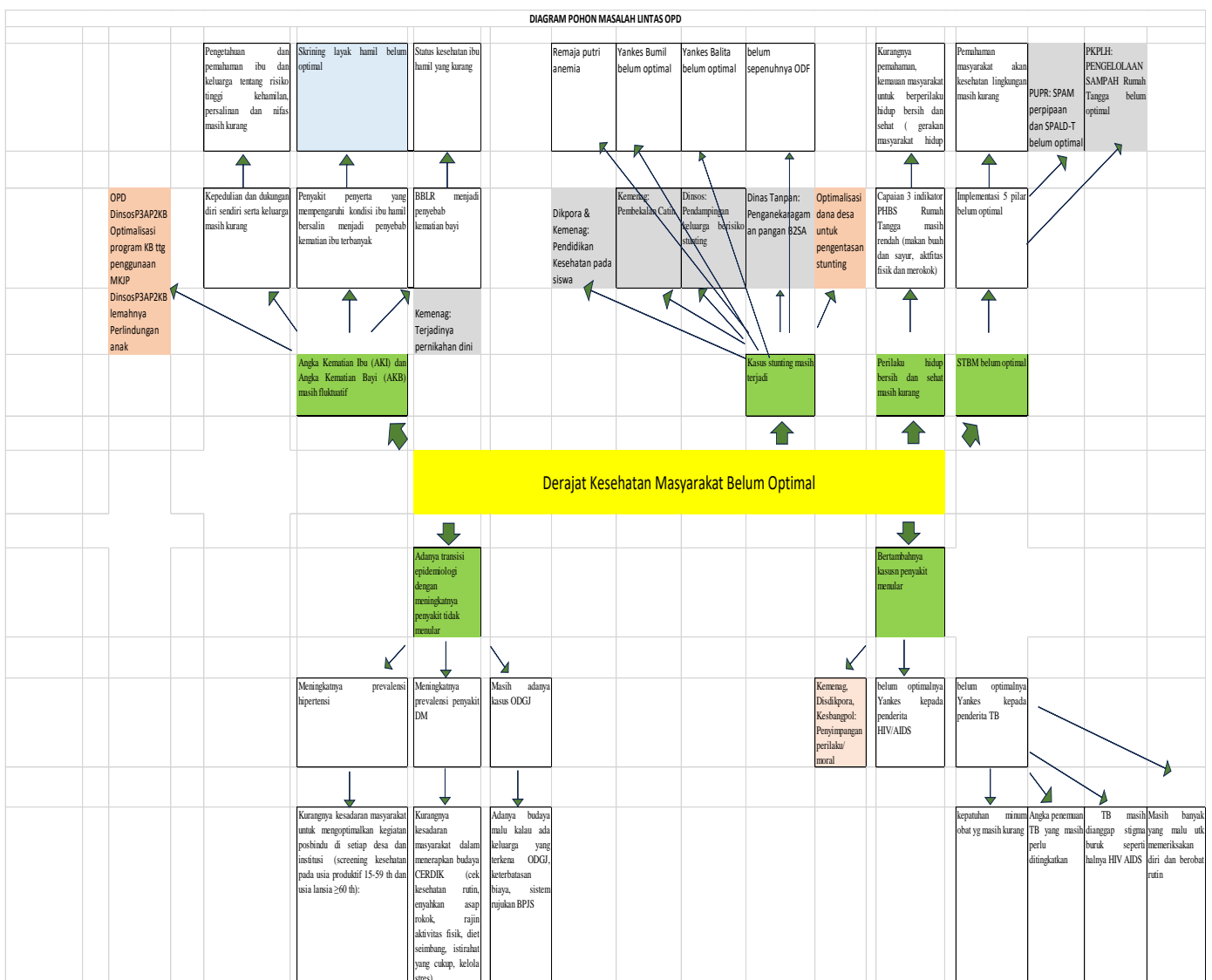


Diagram 1.1 Pohon masalah lintas OPD

Pemetaan permasalahan untuk menentukan prioritas dan sasaran pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
A. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat			
1	Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih fluktuatif	1. Kepedulian dan dukungan diri sendiri serta keluarga masih kurang	Pengetahuan dan pemahaman ibu dan keluarga tentang risiko tinggi kehamilan, persalinan dan nifas masih kurang
		2. Penyakit penyerta yang mempengaruhi kondisi ibu hamil bersalin menjadi penyebab kematian ibu terbanyak	Kurangnya deteksi dini terhadap riwayat penyakit penyerta serta kurangnya pemahaman terhadap risiko penyakit penyerta terhadap kondisi kehamilan, persalinan, nifas serta bayi
		3. BBLR menjadi penyebab kematian bayi	Status kesehatan ibu hamil yang kurang
2	Kasus stunting masih terjadi	Gangguan gizi pada masa remaja dan kehamilan (usia reproduksi)	Pengetahuan ibu tentang gizi kurang Prioritas pengeluaran dalam keluarga
3	Perilaku hidup bersih dan sehat masih kurang	Capaian 3 indikator PHBS Rumah Tangga masih rendah (makan buah dan sayur, aktifitas fisik dan merokok)	Kurangnya pemahaman, kemauan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (gerakan masyarakat hidup sehat)
4	STBM belum optimal	Implementasi 5 pilar belum optimal	Pemahaman masyarakat akan kesehatan lingkungan masih kurang
B. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
1	Adanya transisi epidemiologi dengan meningkatnya penyakit tidak menular	1. Meningkatnya prevalensi hipertensi 2. Meningkatnya prevalensi penyakit DM 3. Masih adanya kasus ODGJ	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan kegiatan posbindu di setiap desa dan institusi (screening kesehatan pada usia produktif 15-59 th dan usia lansia ≥ 60 th): a. pengukuran TB, BB, lingkar perut b. pengukuran TD c. pemeriksaan GDS d. pemeriksaan kolesterol darah total e. pemeriksaan tingkat pendengaran f. pemeriksaan tingkat penglihatan g. pemeriksaan IVA bagi wanita usia 30-59 th 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan budaya CERDIK (cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres) 3. Adanya budaya malu kalau ada keluarga yang terkena

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			ODGJ, keterbatasan biaya, sistem rujukan BPJS
2	Belum tuntasnya pengendalian penyakit menular	1. Penemuan kasus baru HIV/AIDS yang cenderung meningkat setiap tahun 2. TB MDR yang meningkat	1. Penyimpangan perilaku/moral 2. kepatuhan minum obat yg masih kurang 3. Angka penemuan TB yang masih perlu ditingkatkan 4. TB masih dianggap stigma buruk seperti halnya HIV AIDS 5. Masih banyak yang malu utk memeriksakan diri dan berobat rutin

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk penanganan, yaitu:

1. Peningkatan status kesehatan masyarakat dalam tahap kehidupan, mulai dari bayi hingga lansia (Continuum of Care)

Prioritas peningkatan status kesehatan adalah akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dalam siklus kehidupan . Jumlah kematian ibu di tahun 2019 ada 11 kasus dengan sebaran 4 kasus kematian ibu bersalin karena perdarahan (36,3 %), 5 kematian ibu hamil karena hipertensi dalam kehamilan (45,45 %) dan 2 kematian karena penyakit penyerta (18,18 %). Angka Kematian Ibu 72,90 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini sudah diatas target nasional yaitu 105 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian Ibu (AKI) mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yaitu 15 kasus , 6 kasus (40 %) terjadi pada masa kehamilan yang disebabkan oleh eklamsia 1 kasus, Preeklamsia Berat 1 kasus, Penyakit Jantung Bawaan 1 kasus , terkonfirmasi covid 2 kasus, serta B20 1 kasus, sedangkan 11 kasus (60%) terjadi pada masa nifas yang disebabkan oleh perdarahan 1 kasus, SLE 1 kasus, Penyakit Jantung Bawaan 1 kasus dan ternanyak yaitu 6 kasus karena terkonfirmasi covid 19. Bila dilihat dari total keseluruhan kasus kematian 53,3% yaitu 8 kasus disebabkan karena terpapar covid – 19. Kondisi tahun 2021 terjadi lonjakan kasus menjadi 21 kasus, 17 kasus (80,95%) terkonfirmasi covid – 19 , 4 kasus (19,04%) dikarenakan penyulit kehamilan persalinan yaitu, Pre Eklamsia, Penyakit jantung bawaan dan perdarahan. Sedangkan kondisi tahun 2022 terjadi penurunan kasus dari 21 kasus menjadi 12 kasus terdiri dari 1 kasus terkonfirmasi covid – 19 (0,09%) 11 kasus (90,01%) penyulit kehamilan persalinan yaitu, Pre Eklamsia 3 kasus, perdarahan 4 kasus, sepsis 3 kasus dan emboli air ketuban 1 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah kasus kematian ibu sebanyak 11 kasus menurun 1 kasus dibandingkan tahun 2022.

Beberapa faktor resiko yang dihadapi selama kehamilan sampai dengan pasca persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, serta kondisi pandemic covid 19 tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri berkontribusi terhadap peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI). Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan , termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

Penyebab kematian ibu antara lain karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian maternal juga tidak lepas dari kondisi ibu itu sendiri dan merupakan salah satu dari kriteria 4 "terlalu" yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (> 35 tahun), terlalu muda (< 20 tahun), terlalu banyak anak (>4 anak) dan terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (< 2 tahun). Kondisi ini diperburuk oleh adanya pandemic covid 19 yang bersifat global

2. Pencegahan penyakit menular maupun tidak menular

Pada tahun 2020 persentase orang yang terduga TBC dan mendapatkan pelayanan TBC sesuai standard mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari jumlah sasaran 10430 orang yang mendapatkan pelayanan hanya 4325 yaitu 41,46 %, keadaan ini merupakan dampak pandemic covid 19 yang membatasi ruang gerak petugas dan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan sesuai standard, namun pada tahun 2023 pelayanan kesehatan pada orang terduga TB realisasinya meningkat yaitu 106,77 % dengan kasus penderita TB yang tertangani sejumlah 3132 kasus

Kasus HIV, jumlah kasus di tahun 2018 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Di tahun 2018 kasus yang ditemukan sebanyak 46 kasus, sedangkan tahun 2019 sebanyak 152 kasus dengan rincian 109 dalam wilayah dan 43 luar wilayah. Peningkatan jumlah kasus ini perlu dianalisa lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Deteksi dini telah secara luas dilakukan di fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit terhadap pasien dengan faktor risiko tinggi penularan HIV. Namun stigma buruk masyarakat terhadap kasus HIV merupakan salah satu faktor penghambat seseorang dengan risiko tinggi tertular HIV untuk memeriksakan dirinya. Oleh karena itu perlu dilakukan strategi baru dalam melaksanakan deteksi dini HIV/AIDS yaitu dengan mendekati pada kelompok berisiko.

Pada tahun 2020 persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard 15820 orang sedangkan jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten kudus sebanyak 15462 orang yaitu 97,73% dengan jumlah kasus 123 (0,79%) , menurun pada tahun 2021 dari jumlah sasaran 17620 orang yang berisiko terinfeksi HIV sebanyak 17145 (97,30%) dengan jumlah kasus 121 (0,73%). Apabila dibandingkan pada tahun 2022 jumlah sasaran meningkat menjadi 18935 orang dengan jumlah orang berisiko terinfeksi 18520 (97,80%) Berdasarkan hasil temuan kasus tahun 2022 berjumlah 196 orang (1,06%) hal ini meningkat 0,38% dibandingkan tahun 2021. Kejadian HIV tahun 2023 sebanyak 168 terdiri dari 129 orang warga kudus dan 39 orang dari luar wilayah. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan 27 kasus

Kasus DB di tahun 2018 mengalami penurunan drastis. Di tahun 2017 jumlah kasus DBD sebesar 110 dan total kasus di tahun 2018 sebanyak 61 kasus , meningkat pada tahun 2019 karena dipengaruhi oleh faktor cuaca yang ekstrim menjadi 182 kasus, dan pada tahun 2020 menurun secara tajam yaitu 40 kasus, meningkat menjadi 175 kasus pada tahun 2021, dan meningkat secara signifikan pada tahun 2022 sejumlah 553 kasus .Sedangkan DBD pada tahun 2023 sebanyak 385 kasus , bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan sebanyak 168 kasus

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti angka penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes melitus, cedera dan penyakit paru obstruktif kronik serta penyakit kronik lainnya merupakan 63 % penyebab kematian di seluruh dunia dengan membunuh 36 juta jiwa per tahun (WHO, 2010). Di Indonesia sendiri, penyakit tidak menular masih merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas PTM semakin meningkat. Hal tersebut menjadi beban ganda (double burden) dalam pelayanan kesehatan, sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan.

Beberapa faktor resiko PTM antara lain ialah : merokok dan keterpaparan terhadap asap rokok, minum-minuman beralkohol, diet/pola makan, gaya hidup yang tidak sehat , kegemukan, obat-obatan, dan riwayat keluarga (keturunan). Prinsip upaya pencegahan tetap lebih baik dari pengobatan. Upaya pencegahan penyakit tidak menular lebih ditujukan kepada factor resiko yang telah diidentifikasi.

Presentase kasus Penyakit Tidak Menular terbanyak adalah Diabetes Mellitus 119 %, baik IDDM (Insulin dependent Diabetes Mellitus) ataupun NIDDM (Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus), Hipertensi 27,07 % baik hipertensi esensial maupun hipertensi lain, Berdasarkan data penyakit tersebut menjadi prioritas utama dalam pengendalian PTM. Jika Hipertensi dan Diabetes Mellitus tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan PTM Lanjutan seperti Jantung, Stroke, Gagal Ginjal dan sebagainya. Pengendalian PTM dapat dilakukan dengan intervensi yang tepat pada setiap sasaran/ kelompok populasi tertentu sehingga peningkatan kasus baru PTM dapat ditekan.

3. Percepatan Penurunan Stunting

Stunting merupakan issue masalah kesehatan yang sampai saat ini masih menjadi masalah gizi pada balita. Masalah gizi kronis karena kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu panjang yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan anak. Prevalensi stunting di Kabupaten Kudus berdasarkan hasil operasi timbang serentak tahun 2022 yaitu 5,85% , meningkat 1,35% dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 4,5% . Pada tahun 2023 yaitu 3,9 % menurun 1,95% dibandingkan tahun 2022 . Upaya yang telah dilakukan inovasi rumah bintangku, menggiatkan posyandu dan intervensinya , kelas balita stunting dan koordinasi lintas sektor berupa pemanfaatan dana desa untuk kegiatan pencegahan stunting.

5. Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia

Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga kesehatan masih sangat kurang bila dibandingkan dengan standar tenaga kesehatan yang seharusnya bila dihitung berdasarkan jumlah penduduk, beban kerja dan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Dengan tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan yang meningkat, bila hal ini kurang diantisipasi oleh tenaga kesehatan maka akan berakibat buruk dari berbagai aspek kehidupan khususnya untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pendidikan formal dan non formal dirasakan sangat kurang, sehingga diperlukan untuk ditingkatkan sesuai dengan jenjang dan profesi yang dimiliki.

Hal ini selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat diidentifikasi permasalahan yang mengacu pada permasalahan yang terdapat didalam RENSTRA tahun 2018-2023 untuk urusan wajib pelayanan dasar Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan, isu strategis yaitu :

- a. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
 - 1) Tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
 - 2) Masih ditemukan balita gizi kurang dan stunting
- b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1) Adanya transisi epidemiologi dengan meningkatnya penyakit tidak menular
 - 2) Belum tuntasnya pengendalian penyakit menular
- c. Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

C. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus selama tahun 2023. Dalam laporan ini, pencapaian sasaran, yaitu dengan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan secara singkat tentang tugas dan fungsi, analisa isu strategis serta issue strategi dan permasalahan .

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan perencanaan kinerja meliputi perjanjian kinerja kepala dinas sampai sub koordinator dikaitkan dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhiungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah kabupaten kudus yang tertuang dalam visi Bupati Kudus , Tahun 2018– 2023 yaitu kudus bangkit menuju kabupaten modern, religius, cerdas dan sejahtera . Untuk mewujudkan visi tersebut melalui 4 pilar pembangunan yaitu pilar ke satu yaitu mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia yang dijabarkan dalam perencanaan kinerja Dinas Kesehatan.

Perencanaan kinerja dituangkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat kudus. Perjanjian penetapan kinerja tahun 2022 telah ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Secara singkat dapat digambarkan tujuan ,sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	76,54
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	52,78
			Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	6,9
		Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,8
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	%	100
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	91

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan urusan kesehatan yang harus diselenggarakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tujuan dan Sasaran RPJMD) Tahun 2018 – 2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1.	Angka Kematian Ibu	65,97	65,97	59,27	59,27	52,78	52,78	52,78
2.	Angka Kematian Bayi	8	7,8	7,5	7,3	7,1	6,9	6,9
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	19,05%	19,00%	18,94%	18,87%	18,79%	18,60%	18,60%
4.	Cakupan Pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Cakupan Desa/kel. Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Cakupan pelayanan dan sumber daya Kesehatan	90,0%	90,0%	91,3%	91,3%	92,3%	92,7%	92,7%
8.	Cakupan pelayanan BLUD	100%	100%	-	-	-	-	-
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,5	82	83	83,5	85	85

Selain mengacu pada RPJMD Indikator kinerja Dinas Kesehatan juga mengacu pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Bidang Kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Adapun indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Target Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standard	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan peralihan sesuai standard	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Presentase balita yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Target Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	kesehatan balita sesuai standar						
5.	Presentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase usia produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Presentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Presentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Presentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perencanaan kinerja untuk pencapaian indikator kinerja tertuang dalam perjanjian kinerja merupakan komitmen kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan dan dievaluasi tingkat keberhasilannya sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja. Adapun perjanjian kinerja struktural Dinas Kesehatan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	76,54
		Angka Kematian Ibu (AKI)	52,78
		Angka Kematian Bayi (AKB)	6,9
2	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,8
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	91

2. Sekretaris Dinas

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	85 indeks
		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	18 dokumen
		Jumlah dokumen administrasi keuangan	12 dokumen
		Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	15 orang

	Jumlah laporan pengelolaan administrasi umum	7 laporan
	Jumlah laporan pengelolaan penyediaan jasa penunjang pada Dinas	4 laporan
	Jumlah laporan pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan	4 laporan

3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	92 persen
		Jumlah penyediaan fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	19 Puskesmas
		Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator
		Jumlah penyediaan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	21 lokasi
		Jumlah Rumah Sakit Tipe C dan D serta klinik yang memenuhi syarat perizinan	9 lokasi
		Jumlah laporan pengelolaan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM	2 laporan
		Jumlah pengelola industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan	120 IRT
		Jumlah produksi dan produk makanan yang memenuhi syarat kesehatan	120 unit

4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen
2	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	18 %
		Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator
		Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	825 lokasi
		Jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	9 lokasi

		Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132	desa/kelu
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3	kali
		Jumlah desa siaga aktif mandiri	23	desa/kel

5. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100 %
	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %
		Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100 %
		Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator

6. Sub Koordinator di Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Sub Koordinator di Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	8 Unit
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit
		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 jenis
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	170 Unit
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	6 jenis
		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	35 jenis

	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10	jenis
	Menerima , Memeriksa dan Menyimpan Perbekalan Farmasi	75	kegiatan
	Mendistribusikan Perbekalan Farmasi	1020	BBK & BAST
	Mendistribusikan Perbekalan Farmasi	1020	BBK & BAST
	Merekapitulasi Data	800	laporan
	Penyusunan Laporan Kegiatan Pengelolaan Perbekalan farmasi	48	laporan
	Menerima , Memeriksa dan Menyimpan Perbekalan Farmasi	75	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	228	dokumen
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	19	Unit
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit
	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	3	Unit
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	19	Unit
	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	9	Dokumen
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60	Orang
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12	dokumen
	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	60	Unit

7. Sub Koordinator di Bidang Kesehatan Masyarakat

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Sub Koordinator di Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17186	orang

Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16405	Orang
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15642	Orang
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77148	balita
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45325	Orang
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	dokumen
	Jumlah tenaga kesehatan lingkungan yang mengikuti pelatihan advokasi	32	orang
	Jumlah pengadaan buku saku germas	1300	buku
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12	Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12	Dokumen
	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12	Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12	dokumen

8. Sub Koordinator di Bidang Pengendalian Penyakit

Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja Sub Koordinator di Bidang Pengendalian Penyakit Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590928 orang
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	357000 orang

	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236931 orang
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18383 Orang
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2279 orang
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10978 orang
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19737 orang
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 orang
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 paket
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 laporan
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 dokumen
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2500 Orang

B. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Adapun rincian alokasi anggaran untuk setiap sasaran strategis berdasarkan program kegiatan tertuang dalam table 2.12 dibawah ini :

Tabel 2.12 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.116.906.204
1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259.801.800
1.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.299.500
1.2.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.502.300
1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78.967.703.500
1.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78.855.790.000
1.2.02.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.600.000
1.2.02.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.313.500

1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000
1.2.05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.817.040
1.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	356.000.000
1.2.06.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.392.000
1.2.06.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.268.000
1.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.177.240
1.2.06.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.455.800
1.2.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000
1.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.324.000
1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.803.630.864
1.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.150.000
1.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	443.034.364
1.2.08.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.929.000
1.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.338.517.500
1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.471.953.000
1.2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	317.731.000
1.2.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.154.222.000
2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	161.138.314.216
2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.679.546.660
2.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	19.980.000
2.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.931.971.000
2.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.323.157.700
2.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	6.958.027.310
2.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	7.474.454.950
2.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	467.180.000
2.2.01.5 Pengembangan Rumah Sakit	1.260.152.000
2.2.01.9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	12.244.623.700

2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121.107.633.861
2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.536.995.800
2.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.749.900
2.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.754.570.000
2.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	625.067.000
2.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	109.362.000
2.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	10.000.000
2.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17.643.537.750
2.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	90.020.640
2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.340.069.825
2.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	372.170.700
2.2.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	425.481.000
2.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	715.016.000
2.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	9.999.900
2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	466.122.160
2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.982.311.840
2.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	83.092.500
2.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	190.331.000
2.2.02.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	221.058.500
2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	43.267.008.998
2.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	679.576.500
2.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	811.002.400
2.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	925.443.250
2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	67.712.000
2.2.02.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.365.491.800
2.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	181.700.700
2.2.02.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.912.500
2.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	52.000.000

2.2.02.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	848.177.900
2.2.02.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	670.457.000
2.2.02.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	113.062.898
2.2.02.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	286.321.400
2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	158.810.000
2.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	615.032.500
2.2.03.3 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	615.032.500
2.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	736.101.195
2.2.04.3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	418.993.595
2.2.04.4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	317.107.600
3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.394.122.100
3.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.394.122.100
3.2.03.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.394.122.100
4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	642.126.010
4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	282.831.550
4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	282.831.550
4.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	177.252.320
4.2.04.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	177.252.320
4.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	23.076.160
4.2.05.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	23.076.160
4.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	158.965.980
4.2.06.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	158.965.980
5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.691.736.600
5.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.937.506.000

5.2.01.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.937.506.000
5.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	272.504.300
5.2.02.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	272.504.300
5.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	481.726.300
5.2.03.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	481.726.300
Total	248.983.205.130

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic. Esensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program/ kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip *good governance* dengan pilarnya akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandate suatu instansi dalam pelayanan *public* yangn bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah tercapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara lansung kaitan anantara sasaran dengan indicator kerjanya, sehingga keberhasilan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan apat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemeribntah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : $\geq 91\%$;
- b. Baik : 76 – 90,99%;
- c. Cukup : 66 – 75,99%;
- d. Kurang : 51 – 65,99%;
- e. Sangat Kurang: $\leq 50,99\%$.

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi yaitu :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat pencapaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Capaian} = \frac{\text{Rencana/target} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana/target})}{\text{Rencana/target}} \times 100 \%$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Utama Dinas Kesehatan

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tahun 2023

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	76,52	76,84	100,39
2		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100000 KH	52,78	82,67	29,89
3		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	6,9	7,82	92
4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,8	0,8	100
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	%	100	100	100
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	91	58,60	64,40

Sumber : laporan pemegang program kegiatan 2023

Berdasarkan tabel tersebut dari Indikator Kinerja Utama 50 % capaian masih dibawah target yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) 92% , Indeks Keluarga Sehat (IKS) 75% dan nilai SAKIP 64,40%

2. Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2018	Target Tahun 2023	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023
1	Angka Kematian Ibu	65,97	52,78	52,78	82,67
2	Angka Kematian Bayi	8	6,9	6,9	7,82
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	19,05%	18,4%	18,60%	3,90%
4	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	100%	97,25%
5	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%	100%	96,45%
6	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	100%	100%	100%
7	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,00%	91,30%	92,7%	96,73%

Dari tabel di atas, terdapat 7 (tujuh) indikator , 1 (satu) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 14,28% dari total program. Sementara itu, sebanyak 6 (enam) indikator atau sebesar 85,71% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 97,25%, sementara indikator yang mengalami capaian yang terendah adalah indikator Angka Kematian Bayi dengan realisasi 7,82 dengan persentase 86,67%.

3. Capaian kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO	INDIKATOR	Target	2023
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	99,07%
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan peralihan sesuai standar	100%	100%
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	98,94%
4	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	92,68%
5	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%

NO	INDIKATOR	Target	2023
6	Persentase usia produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	91,05%
7	Presentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	92,84%
8	Presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	93,24%
9	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	95,35%
10	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	92,33%
11	Presentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	106,77%
12	Presentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dari dua belas Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2023 , hanya tempat indikator yang sudah mencapai target yaitu pelayanan ibu bersalin mendapatkan pelayanan peralihan sesuai standar , pelayanan usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar , pelayanan orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dan pelayanan kesehatan pada orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/promotive dan pencegahan / preventif

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja mulai dari kepala dinas, kepala bidang dan subkoordinator yang meliputi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tanggung jawab terhadap enam capaian Indikato Kinerja Utama (IKU) serta 12 indikator capaian Standar Minimal Kesehatan (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten yang akan memberikan daya ungkit terhadap capaian kinerja Bupati Kudus Bidang Kesehatan.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.4. Realisasi Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tahun Periode 2019 2023

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Tahun	Realisasi IKU OPD per Triwulan				Persentase Realisasi IKU OPD	Predikat
						Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	76,54	76,77	76,77	76,77	76,84	100,39 %	Sangat Tinggi
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dikali 100.000	per 100.000 kelahiran hidup	52,78	122,74	73,11	79,57	82,67	61,48 %	Rendah
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi	Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 tahun) selama tahun tertentu dibagi banyaknya kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000	per seribu	6,90	6,40	7,90	8,16	7,82	107,25 %	Sangat Tinggi
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Proporsi keluarga sehat dibagi jumlah seluruh keluarga di wilayah tertentu dikali 100 %	Angka	0,80	0,35	0,49	0,55	0,80	100,00 %	Sangat Tinggi
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	Jumlah puskesmas yang meningkat status akreditasinya dalam periode tertentu dibagi jumlah puskesmas pada periode yang sama dikali 100%	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	Sangat Tinggi
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat	Nilai	91,00	53,80	58,60	58,60	100,00	109,89 %	Sangat Tinggi

Sumber realisasi pada e-planing 2023

Dari tabel diatas indikator kinerja utama yaitu 83,33% dengan kategori sangat tinggi, 16,6 % rendah.

Adapun analisis dari capaian tersebut adalah sebagai berikut :

1). Angka Harapan Hidup

Peningkatan IPM menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, harapan hidup, sekolah, maupun hidup layak semakin panjang. Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kudus tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 relatif tetap, bila dibandingkan dengan target 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,11% . Hal ini menunjukkan tidak ada perubahan angka harapan hidup secara signifikan. Namun bila dibandingkan dengan angka harapan hidup tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 18% .

Upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian angka harapan hidup adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai sektor yang tertuang dalam program kegiatan pada bidang kesehatan masyarakat meliputi gizi masyarakat dan kesehatan keluarga, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olah Raga dan Kesehatan Kerja, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi

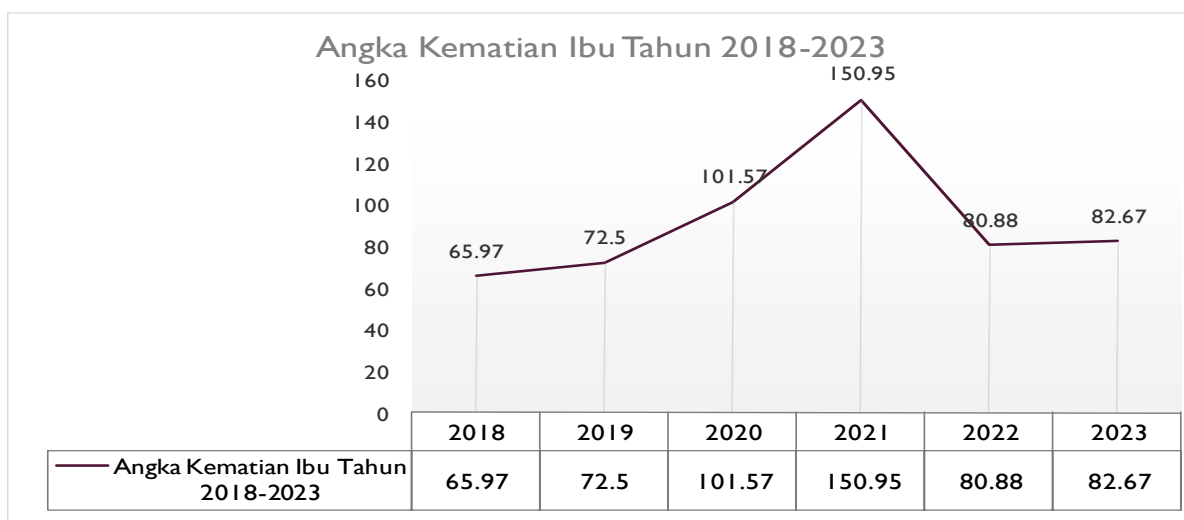
pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa, surveilan dan Imunisasi serta Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa serta bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi perijinan, sertifikasi, farmasi, perbekalan kesehatan, manajemen informasi, dan pengembangan kesehatan serta Pelayanan dan pembiayaan kesehatan

2). Angka Kematian Ibu

Kematian ibu merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek, baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non kesehatan yang mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan pengertian dari semua pihak mengenai pentingnya dan peran berbagai aspek dalam penanganan masalah kematian ibu sehingga strategi untuk mengatasinya harus merupakan integrasi menyeluruh bagi semua pihak.

Secara umum Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kudus dalam lima tahun terakhir berada di bawah angka nasional dan dibawah target yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah. Gambaran AKI selama lima tahun dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada diagram 3.1 dibawah ini:

Diagram 3.1 Angka Kematian Ibu Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023



Berdasarkan data tersebut diatas Angka Kematian Ibu Tahun 2021 bila dibandingkan target 59,27 meningkat sangat signifikan yaitu 150,95 (21 kasus) dengan capaian -54,68 yang artinya sangat kurang . Penyebab kematian terbanyak karena terkonfirmasi covid 19 yaitu 17 kasus (80,95%), 4 kasus (19,04%) karena penyulit kehamilan dan persalinan yaitu Pre Eklamsia, Eklamsia, Penyakit Jantung Bawaan dan TBC. Menurun pada tahun 2022 menjadi 12 kasus dengan penyebab langsung akibat komplikasi atau penyulit kehamilan, persalinan dan nifas yaitu 95%. Tahun 2023 kasus kematian ibu mengalami penurunan kasus dari 12 kasus pada tahun 2022 menjadi 11. Adapun penyebab kematian ibu tahun 2023 ini 6 kasus karena perdarahan, 1 pre eklamsia, 4 karena penyulit yaitu efusi pleura, ca rectum, syok sepsis dan syok distrutif tb Paru

Kematian ibu akibat persalinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Kematian ibu akibat persalinan itu tidak hanya disebabkan oleh faktor kesehatan ibu saja tapi faktor eksternal. Berdasarkan hasil analisis data resiko tinggi ibu hamil tahun 2022 lebih tinggi dari target nasional yaitu 20% tapi di Kudus tahun 2022 naik menjadi 28%, hal ini karena masih banyaknya ibu hamil yang seharusnya tidak layak hamil tapi tetap hamil yaitu ibu hamil dengan 4 T (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak, dan Terlalu sering) serta ALKI (Anemia, Lila kurang dari 23,5 cm, penyakit kronis dan penyakit Infeksi menular seksual. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab tidak langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit kronis seperti jantung, TB Paru, hepatitis, leukemia, SLE, hipertensi serta diperburuk oleh kejadian pandemic covid 19. Faktor penyebab kematian yang lain adalah faktor usia, jumlah anak (paritas), eklamsia, dan perdarahan. Untuk itu konsep safe motherhood pilar pertama harus dikuatkan yaitu “Keluarga Berencana”, memastikan bahwa baik individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi dan layanan keluarga berencana untuk merencanakan waktu, jumlah dan jarak kehamilan. Penanganan kasus kematian ibu memerlukan kerjasama yang baik lintas program dan lintas sektor. Hal ini dimaksudkan agar ibu hamil benar-benar merupakan kehamilan yang diinginkan dan kondisi ibu sehat. diusahakan tidak hamil lagi atau tidak hamil dulu sebelum kondisi ibu sehat.

Berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilaksanakan di Kabupaten, sesungguhnya kematian ibu yang terjadi sebagian besar penyebabnya masih bisa dicegah jika semua pihak sepakat dan berbuat untuk upaya penurunan kematian ibu baik dari masyarakat, fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan termasuk dukungan sarana dan tenaga yang kompeten. Penyebab kematian ibu di kabupaten kudus antara lain perdarahan, eklamsia, infeksi dan penyebab non obstetrik, dimana perdarahan merupakan penyebab terbanyak yaitu 25% pada tahun 2014, 20% tahun 2015, 18 % tahun 2016, 23,91% pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 49% dan pada tahun 2019 36,36 % , namun untuk tahun 2020 ini penyebab kematian terbanyak akibat terkonfirmasi covid 19 sebanyak 8 kasus yaitu 53,33%. Tahun 2021 dari 21 kasus, penyebab kematian tertinggi karena terkonfirmasi covid 19 sebanyak 17 kasus (80,95 %) , hanya 4 kasus (19,04 %) karena Pre Eklamsi, Elkamsi, Penyakit jantung dan TBC.

Kemampuan tenaga kesehatan dan setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan deteksi secara dini adanya faktor risiko baik melalui pemeriksaan fisik maupun penunjang seperti laboratorium sesuai standar harus dipenuhi bagi setiap ibu hamil, yang merupakan haknya, termasuk juga kemampuan penanganan kegawatdaruratan Obstetri baik pada penanganan fasilitas pelayanan tingkat pertama maupun fasilitas pelayanan tingkat lanjut.

3). Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung fluktuatif tapi masih lebih rendah dibandingkan target nasional yaitu 23 per 1000 kh. Hal ini merupakan dampak dari tingginya ibu hamil resiko tinggi yang melebihi standart nasional

20% tapi di Kabupaten Kudus sebesar 28%. Penyebab kematian bayi tertinggi disebabkan kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yang membutuhkan intervensi adekuat karena belum ada kematangan organ. Penyebab BBLR adalah persalinan sebelum waktunya atau prematur, disamping itu kasus yang lain adalah asfiksia (kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan dan teratur), sepsis (kondisi medis serius di mana terjadi peradangan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi), dan kelainan kongenital juga masih cukup tinggi di Kabupaten Kudus. Tahun 2020 angka kematian bayi 8,26 / 1000 kh menurun 1,51 pada tahun 2021 menjadi 6,75 /1000 kh dengan capaian 107,53 % dan bila dibandingkan dengan tahun 2022 meningkat 7,79/ 1000 kh. Tahun 2023 realisasinya 7,82 dengan capaian kinerja 86,67 % menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

4). Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila $IKS > 0,800$; 2) Keluarga Pra Sehat, bila $IKS = 0,500 - 0,800$; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila $IKS < 0,500$ adapun 12 indikator keluarga sehat terdiri dari : keluarga yang mengikuti keluarga berencana, persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif, pertumbuhan balita dipantau, penderita TB paru berobat sesuai standard, penderita hipertensi berobat teratur, penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota JKN, keluarga mempunyai saran air bersih dan keluarga menggunakan jamban sehat.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga sehat kabupaten kudus perhitungan Indeks Keluarga Sehat dari 12 indikator keluarga sehat yang dilaksanakan di 9 kecamatan adalah sebagai berikut keluarga yang mengikuti keluarga berencana 26,41%, persalinan di fasilitas kesehatan 94,94 %, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 91,64 %, bayi mendapat ASI eksklusif 64,68 %, pertumbuhan balita dipantau 83,95 %, penderita TB paru berobat sesuai standard 55,33 %, penderita hipertensi berobat teratur 17,47 %, penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati 38,61 %, anggota keluarga tidak ada yang merokok 51,00 %, keluarga sudah menjadi anggota JKN61,25 %, keluarga mempunyai saran air bersih 98,64 % dan keluarga menggunakan jamban sehat 97,89 % sehingga total IKS 0,6 artinya status kesehatan masyarakat kudus dikategorikan tidak sehat. Indeks Keluarga Sehat Tahun 2021 yaitu 0,29 , meningkat menjadi 0,35 pada tahun 2022, kondisi ini dibawah target yang diharapkan yaitu 0,7. Pada tahun 2023 meningkat 0,45 menjadi 0,8. Hal ini karena mulai diaktifkan peran kader dan petugas untuk melakukan survey secara optimal, koordinasi lintas sektoral, pemberdayaan masyarakat

sehingga mampu menjangkau target secara keseluruhan serta adanya komitmen bersama menjadikan kudu kabupaten sehat.

5). Persentase puskesmas dengan peningkatan status akreditasi

Presentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi dari 19 puskesmas yang melaksanakan reakreditasi di kabupaten kudu 100 % mengalami peningkatan strata akreditasinya, hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan mengalami kemajuan yang sangat signifikan, namun penguatan kegiatan akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tetap perlu dilakukan karena merupakan salah satu komponen dalam mempertahankan kualitas mutu pelayanan publik bidang kesehatan karena berhubungan langsung dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2023 kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pendampingan agar status akreditasi yang telah tercapai pada periode reakreditasi sebelumnya tidak mengalami penurunan kualitas pelayanan, dikarenakan secara kumulatif dari 19 Puskesmas yang telah mengikuti reakreditasi mengalami peningkatan status akreditasi.

6). Nilai evaluasi SAKIP

Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun 2021 Dinas Kesehatan memperoleh nilai 93,91. Hal ini sudah melebihi target yang diharapkan yaitu 85 pada tahun 2021 dan 87 pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 realisasinya 58,60 dengan capaian kinerja 64,40. Dengan demikian berdasarkan hasil evaluasi Dinas Kesehatan termasuk kategori BB artinya kinerja dinas kesehatan yang meliputi komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sangat baik.

Sebagai tolok ukur kinerja organisasi yang lain adalah capaian kinerja urusan kesehatan terhadap target RKPD seperti tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel 3.5 Status Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2018	Target Tahun 2023	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Status thdp Target RKPD Tahun 2021	Status thdp Target Akhir RPJMD 2023
1.	Angka Kematian Ibu	65,97	52,28	52,78	82,67	Tidak tercapai	Tidak tercapai
2.	Angka Kematian Bayi	8	7,1	6,9	7,82	Tidak Tercapai	Telah tercapai
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat	19,05%	18,40%	18,60%	3,9%	Tercapai	Telah tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2018	Target Tahun 2023	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Status thdp Target RKPD Tahun 2021	Status thdp Target Akhir RPJMD 2023
	pendek) pada anak dibawah dua tahun						
4.	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	100%	97,25%	Tidak tercapai	Akan dicapai
5.	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%	100%	96,45%	Tidak tercapai	Akan dicapai
6.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	100%	100%	100%	Tidak tercapai	Akan tercapai
7.	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,00%	91,30%	92,7%	96,73%	Tidak Tercapai	akan tercapai

Berdasarkan data tersebut 85,71 % status capaian kinerja terhadap RPJMD belum tercapai yaitu Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, cakupan pelayanan pengendalian penyakit dan cakupan pelayanan sumber daya kesehatan.

Adapun penerapan kinerja menurut Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang diamanatkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Status Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

NO	INDIKATOR	Target	2023	Status
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	99,07%	Belum tercapai
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan peralihan sesuai standar	100%	100%	Belum tercapai
3	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	98,94%	Belum tercapai
4	Presentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	92,68%	Belum tercapai
5	Presentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	Tercapai
6	Persentase usia produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	91,05	Belum tercapai
7	Presentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	92,84%	Belum tercapai
8	Presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	93,24%	Belum tercapai

NO	INDIKATOR	Target	2023	Status
9	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	95,35%	Belum tercapai
10	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	92,33%	Belum tercapai
11	Presentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	106,77%	Tercapai
12	Presentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	100%	100%	Tercapai

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 33,33% tercapai yaitu pelayanan pada ibu bersalin, usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan terduga TB dan deteksi HIV sudah tercapai sedangkan 66,66 % belum tercapai.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun).

Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020			Capaian Kinerja Tahun 2021			Capaian Kinerja Tahun 2022			Capaian Kinerja Tahun 2023		
				target	realisasi	capaian (%)	target	realisasi	capaian (%)	target	realisasi	capaian (%)	target	realisasi	capaian (%)
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	76,49	76,6	100	76,51	76,77	100	76,52	76,77	100,33	76,54	76,84	100,39
2		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100000 KH	59,27	101,57	28,63	59,27	150,95	-54,68	52,78	80,88	45,29	52,78	82,67	43,36
3		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	7,5	8,26	89,86	7,3	6,75	107,53	7,1	7,79	90,22	6,9	7,82	86,67
4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,5	0,25	50	0,6	0,29	45	0,7	0,35	50	0,8	0,6	75
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	82	77,28	91,13	85	93,91	110,48	87	93,91 (LKE 2021)	107,94	91	58,6	64,4

Berdasarkan perbandingan capaian indikator utama 4 tahun terakhir belum menunjukkan progres peningkatan yang signifikan, Rata rata persentase capaian tahun 2019 yaitu 91,83% menurun 0,09 pada tahun 2020 menjadi 76,60 % ,pada tahun 2021 menjadi 64,79 %, meningkat menjadi 82,29 % pada tahun 2022, pada tahun 2023 meningkat 85,29 %

Upaya yang dilakukan yaitu penguatan puskesmas dan jaringannya penguatan manajemen program dan sistem rujukan, peningkatan peran serta masyarakat, penguatan kemitraan dan

kerjasama, penguatan akselesari dan inovasi dengan cara optimalisasi aplikasi Si Bulan dengan rujukan terintegrasi dengan fasilitas kesehatan tingkat kabupaten dan provinsi serta audit maternal dan neonatal yang berkelanjutan.

Tabel 3.8 Perbandingan Status Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023

No	Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2018	Target Tahun	Realisasi	Target Tahun	Realisasi	Target Tahun	Realisasi	Target Tahun	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Status thdp Target RKPD Tahun 2021	Status thdp Target Akhir RPJMD 2023
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023			
1	Angka Kematian Ibu	65,97	59,27	101,57	59,27	150,95	52,28	80,88	52,28	43,36	52,54%	Tercapai	Tercapai
2	Angka Kematian Bayi	8	7,5	8,26	7,3	6,75	7,1	7,79	7,1	7,82	6,9	Tidak Tercapai	Tidak tercapai
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	19,05%	18,94%	4,60%	18,00%	4,50%	18,40%	4,50%	18,40%	3,90%	18,60%	Tercapai	Tercapai
4	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	86,26%	100%	91,18%	100%	95,58%	100%	97,25%	100%	Tidak tercapai	Tidak tercapai
Ter capa i	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%	55,01%	100%	91,54%	100%	74,97%	100%	96,45%	100%	Tidak tercapai	Tidak tercapai
6	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	100%	100%	100%	96,25%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tercapai	Akan tercapai
7	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,00%	90,00%	97,65%	91,30%	94,58%	91,30%	96,73%	91,30%	96,73%	92,70%	Tercapai	Telah tercapai

Dari tabel tersebut perbandingan tiga tahun terakhir mengalami penurunan capaian kinerja terutama pada indikator Angka Kematian Ibu yaitu dari 72,90 pada tahun 2019 meningkat pada tahun 2020 menjadi 101,57 dan meningkat menjadi 150,95 pada tahun 2021 namun menurun menjadi 45,29 % pada tahun 2022. Pada tahun 2023 menurun menjadi 43,36. Hal tersebut diakibatkan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan meningkat selain itu koordinasi lintas program dan lintas sektoral relative lebih baik ,sehingga deteksi dini komplikasi kehamilan dan persalinan yang merupakan factor penyebab kematian ibu dapat diantisipasi sejak awal.

Tabel 3.9 Perbandingan empat tahun terakhir status Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR	Target	2020	2021	2022	2023	Status
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	95,97%	94,86%	95,39%	99,07%	Belum tercapai
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan peralihan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	99,69%	98,63%	99,02%	98,94%	Belum tercapai
4	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	82,90%	91,92%	92,68%	Belum tercapai
5	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	52,83%	79,52%	91,58%	100,00%	Tercapai
6	Persentase usia produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	54,70%	91,05%	Belum tercapai
7	Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	75,42%	92,84%	Belum tercapai
8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	55,54%	93,24%	Belum tercapai
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	119%	100%	92,56%	95,35%	Belum tercapai
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	75,90%	92,33%	Belum tercapai
11	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	41,46%	40,81%	72,91%	106,77%	Tercapai
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	100%	90,91%	100%	97,81%	100,00%	Tercapai

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.10 Perbandingan satu tahun terakhir status Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023.

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2018	Target Tahun	Realisasi	Target Akhir RPJMD	% Capaian	Tingkat Kemajuan
			2023	2023			
1	Angka Kematian Ibu	65,97	52,28	82,67	52,78	43,36	-9,42
2	Angka Kematian Bayi	8	7,1	7,82	6,9	86,67	79,77
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	19,05%	18,40%	3,90%	18,6	20,96	2,36
4	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	95,58%	100	97,25	-2,75
5	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%	74,97%	100	96,45	-3,55
6	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	100%	100%	100	100	0,00
7	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,00%	91,30%	96,73%	93	96,14	3,14

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Penyebab rendahnya capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah indikator Angka Kematian Bayi yang mencapai 7,82 dengan kasus kematian bayi 104 kasus walaupun bila dibandingkan dengan angka nasional masih relative rendah.

Faktor penyebab kematian bayi pada tahun 2023 menduduki urutan ke 15 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Lonjakan AKB tahun 2023 diperkirakan karena berat badan lahir rendah yang berisiko terjadinya infeksi , hipotermi dan gangguan pernafasan .

Berbagai upaya telah dilakukan meliputi meningkatkan akses layanan bagi ibu dan bayi baru lahir berupa peningkatan jumlah kunjungan ANC dari 4x menjadi 6x, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir berupa penguatan antenatal, persalinan dan post natal sesuai standar, penempatan SDM berkualitas, ketersediaan UTD/Bank Darah RS di tingkat kabupaten, pemberdayaan

masyarakat:pemanfaatan buku KIA, revitalisasi posyandu, kelas ibu, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi serta desa siaga aktif, penguatan tata kelola meliputi tata kelola program,tata kelola klinis dan tata kelola manajemen, dan peningkatan peran keluarga , lintas sector dalam memantau kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

2. Sekretaris Dinas , Kepala Bidang dan Sub Koordinator

a. Realisasi Program

**TABEL 3.11 REALISASI PROGRAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023**

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			83.116.906.204	74.282.833.654		89,37 %	23,37 %
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	85 indeks		95,83	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	112,74 %	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			91.779.943.318	78.595.703.983		85,63 %	13,21 %
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100 %		100,00	KEPALA BIDANG Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	100,00 %	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		98,14	KEPALA BIDANG Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	98,14 %	
		Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100 %		95,94	KEPALA BIDANG Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95,94 %	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	18 %		16,80	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	93,33 %	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		98,14	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	98,14 %	
		Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	93 persen		100,00	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	107,53 %	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1.084.895.700	1.024.756.200		94,46 %	14,24 %
		Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	92 persen		100,00	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	108,70 %	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			642.126.010	454.710.050		70,81 %	32,60 %
		Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	92 persen		100,00	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	108,70 %	

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		98,14	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	98,14 %	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.426.072.000	1.180.143.710		82,75 %	15,39 %
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		98,14	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	98,14 %	

Sumber realisasi pada e-planing 2023

Berdasarkan tabel tersebut realisasi anggaran program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman rendah namun capaian kinerjanya tinggi yaitu 99,07 dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 32,60%

b. Realisasi Kegiatan

TABEL 3.12 REALISASI KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			259.801.800	186.306.474		71,71 %	28,29 %
		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	18 dokumen		18,00	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	100,00 %	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			78.967.703.500	70.442.633.090		89,20 %	10,80 %
		Jumlah dokumen administrasi keuangan	12 dokumen		12,00	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	100,00 %	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.000.000	19.003.000		38,01 %	28,66 %
		Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	15 orang		10,00	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	66,67 %	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			563.817.040	558.220.700		99,01 %	0,99 %
		Jumlah laporan pengelolaan administrasi umum	7 laporan		7,00	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	100,00 %	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang			1.803.630.864	1.751.507.521		97,11 %	2,89 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Pemerintahan Daerah							
		Jumlah laporan pengelolaan penyediaan jasa penunjang pada Dinas	4 laporan		4,00	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	100,00 %	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.471.953.000	1.325.162.869		90,03 %	9,97 %
		Jumlah laporan pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan	4 laporan		4,00	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	100,00 %	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			28.611.892.160	25.968.748.406		90,76 %	9,24 %
		Jumlah penyediaan fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	19 Puskesmas		19,00	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	100,00 %	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			61.929.897.463	51.623.827.417		83,36 %	16,64 %
		Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		12,00	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	100,00 %	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			615.032.500	539.190.460		87,67 %	12,33 %
		Jumlah penyediaan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	21 lokasi		21,00	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	100,00 %	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah			623.121.195	463.937.700		74,45 %	25,55 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kabupaten/Kota							
		Jumlah Rumah Sakit Tipe C dan D serta klinik yang memenuhi syarat perizinan	9 lokasi		9,00	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	100,00 %	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.084.895.700	1.024.756.200		94,46 %	5,54 %
		Jumlah laporan pengelolaan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM	2 laporan		2,00	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	100,00 %	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			282.831.550	187.507.100		66,30 %	33,70 %
		Jumlah pengelola industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan	120 IRT		120,00	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	100,00 %	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			177.252.320	169.385.950		95,56 %	-11,08 %
		Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	825 lokasi		697,00	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	84,48 %	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan			23.076.160	20.560.000		89,10 %	10,90 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jajanan							
		Jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	9 lokasi		9,00	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	100,00 %	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			158.965.980	77.257.000		48,60 %	51,40 %
		Jumlah produksi dan produk makanan yang memenuhi syarat kesehatan	120 unit		120,00	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	100,00 %	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			804.500.400	686.686.925		85,36 %	14,64 %
		Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132 desa/kelu		132,00	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	100,00 %	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			272.504.300	257.008.210		94,31 %	5,69 %
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3 kali		3,00	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	100,00 %	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			349.067.300	236.448.575		67,74 %	32,26 %
		Jumlah desa siaga aktif mandiri	23 desa/kel		23,00	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	100,00 %	

Sumber realisasi pada e-planing 2023

Berdasarkan tabel tersebut 2 (11,11%) dari 18 kegiatan realisasi anggaran dibawah 50% yaitu kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar 38,01% dan kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industry rumah tangga sebesar 48,60%, sedangkan capaian kinerja 100% kegiatan diatas 65%.

c. Realisasi Sub Kegiatan

**TABEL 3.13 REALISASI SUB KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023**

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			86.299.500	77.966.074	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN	90,34 %	9,66 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen		7,00		100,00 %	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			173.502.300	108.340.400	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN	62,44 %	37,56 %
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan		6,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			78.855.790.000	70.332.419.900	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN	89,19 %	-0,83 %
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10430 orang/bulan		9.216,00		88,36 %	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			105.600.000	105.600.000	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN	100,00 %	0,00 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			6.313.500	4.614.000	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN	73,08 %	26,92 %
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			50.000.000	19.003.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	38,01 %	61,99 %
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang		100,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			356.000.000	354.677.900	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	99,63 %	0,37 %
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.392.000	50.007.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	99,24 %	0,76 %
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 paket		3,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Disediakan						
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.268.000	20.263.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	99,98 %	0,02 %
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			58.177.240	57.269.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	98,44 %	1,56 %
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16.455.800	14.723.500	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	89,47 %	10,53 %
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket		4,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200.000	4.200.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	100,00 %	0,00 %
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 dokumen		10,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			58.324.000	57.080.300	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	97,87 %	2,13 %
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.150.000	1.114.000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	96,87 %	3,13 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			443.034.364	399.021.653	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	90,07 %	9,93 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.929.000	20.888.500	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	99,81 %	0,19 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.338.517.500	1.330.483.368	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	99,40 %	0,60 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			317.731.000	263.228.527	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	82,85 %	7,15 %
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit		45,00		90,00 %	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan			1.154.222.000	1.061.934.342	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	92,00 %	8,00 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2,00		100,00 %	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit			1.260.152.000	1.106.751.400	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	87,83 %	12,17 %
		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		1,00		100,00 %	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			10.084.137.700	9.838.457.240	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	97,56 %	2,44 %
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	8 Unit		8,00		100,00 %	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			19.980.000	8.819.160	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	44,14 %	55,86 %
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit		1,00		100,00 %	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.931.971.000	2.887.975.000	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	98,50 %	1,50 %
		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 jenis		3,00		100,00 %	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			5.489.038.000	4.969.397.678	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	90,53 %	9,47 %
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	170 Unit		170,00		100,00 %	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			2.325.943.310	2.265.250.947	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	97,39 %	2,61 %
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	6 jenis		6,00		100,00 %	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			6.375.920.150	4.811.201.831	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	75,46 %	24,54 %
		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	35 jenis		35,00		100,00 %	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			124.750.000	80.895.150	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	64,85 %	35,15 %
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 jenis		10,00		100,00 %	
		Menerima , Memeriksa dan Menyimpan Perbekalan Farmasi	75 kegiatan		75,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Mendistribusikan Perbekalan Farmasi	1020	BBK & BAST	1.020,00		100,00 %		
		Mendistribusikan Perbekalan Farmasi	1020	BBK & BAST	1.020,00		100,00 %		
		Merekapitulasi Data	800	laporan	800,00		100,00 %		
		Penyusunan Laporan Kegiatan Pengelolaan Perbekalan farmasi	48	laporan	48,00		100,00 %		
		Menerima , Memeriksa dan Menyimpan Perbekalan Farmasi	75		75,00		100,00 %		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				161.864.000	156.812.480	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	96,88 %	-16,20 %
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17186	orang		13.866,00		80,68 %	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				157.895.000	143.858.700	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	91,11 %	-9,54 %
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16405	Orang		13.381,00		81,57 %	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				128.604.000	105.456.645	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	82,00 %	2,16 %
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15642	Orang		13.165,00		84,16 %	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				97.400.800	88.191.060	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	90,54 %	-10,20 %
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77148	balita		61.986,00		80,35 %	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				219.600.000	199.455.116	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	90,83 %	9,17 %
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45325	Orang		45.325,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				155.287.000	136.633.000	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	87,99 %	-0,10 %
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590928	orang		519.337,00		87,88 %	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				113.062.898	101.868.950	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	90,10 %	-63,50 %
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	357000	orang		94.958,00		26,60 %	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				10.148.400	10.148.400	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	100,00 %	-10,31 %
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236931	orang		212.511,00		89,69 %	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				40.000.000	32.170.000	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	80,43 %	15,06 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18383	Orang		17.553,00		95,48 %	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				32.849.900	32.849.900	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	100,00 %	-15,45 %
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2279	orang		1.927,00		84,55 %	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				1.632.949.000	74.179.500	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	4,54 %	95,46 %
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10978	orang		13.037,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				493.040.000	463.169.280	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	93,94 %	4,91 %
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19737	orang		19.511,00		98,85 %	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				9.175.476.750	7.766.337.973	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	84,64 %	15,36 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19	dokumen		19,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				90.020.640	84.592.050	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	93,97 %	6,03 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	dokumen		12,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				332.550.825	314.604.515	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	94,60 %	5,40 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	dokumen		12,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				372.170.700	355.560.250	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	95,54 %	4,46 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	dokumen		12,00		100,00 %	
		Jumlah tenaga kesehatan lingkungan yang mengikuti pelatihan advokasi	32	orang		32,00		100,00 %	
		Jumlah pengadaan buku saku germas	1300	buku		1.300,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				306.840.000	271.801.840	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	88,58 %	11,42 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	dokumen		12,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				9.999.900	9.999.900	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	100,00 %	0,00 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 orang		1.274,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			466.122.160	444.263.020	KEPALA BIDANG Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95,31 %	4,69 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen		12,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			45.982.311.840	39.346.790.900	KEPALA BIDANG Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	85,57 %	14,43 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	228 dokumen		228,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			45.792.500	26.309.900	KEPALA BIDANG Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	57,45 %	42,55 %
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 paket		12,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			190.331.000	167.049.320	KEPALA BIDANG Kesehatan Masyarakat	87,77 %	12,23 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 dokumen		12,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			811.002.400	581.919.293	KEPALA BIDANG Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	71,75 %	1,93 %
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	19 Unit		14,00		73,68 %	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			778.993.250	615.126.500	KEPALA BIDANG Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	78,96 %	21,04 %
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 laporan		12,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			67.712.000	44.229.050	KEPALA BIDANG Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	65,32 %	34,68 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 dokumen		12,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			960.000	960.000		100,00 %	0,00 %
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2544 Orang		2.675,00		100,00 %	
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			4.912.500	4.490.000		91,40 %	8,60 %
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan	300 Orang		300,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		elayanan kesehatan sesuai standar							
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				52.000.000	44.999.875	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	86,54 %	-81,54 %
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2500	Orang		125,00		5,00 %	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet				615.032.500	539.190.460	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	87,67 %	12,33 %
		Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	3	Unit		3,00		100,00 %	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				306.013.595	230.223.400	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	75,23 %	24,77 %
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	19	Unit		19,00		100,00 %	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				317.107.600	233.714.300	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	73,70 %	26,30 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	9	Dokumen		9,00		100,00 %	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.084.895.700	1.024.756.200	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	94,46 %	5,54 %
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60	Orang		60,00		100,00 %	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				282.831.550	187.507.100	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	66,30 %	33,70 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12	dokumen		12,00		100,00 %	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene				177.252.320	169.385.950	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	95,56 %	4,44 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen		12,00		100,00 %	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			23.076.160	20.560.000	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	89,10 %	10,90 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen		12,00		100,00 %	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			158.965.980	77.257.000	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	48,60 %	51,40 %
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	60 Unit		60,00		100,00 %	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			804.500.400	686.686.925	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	85,36 %	14,64 %
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 dokumen		12,00		100,00 %	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			272.504.300	257.008.210	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	94,31 %	5,69 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen		12,00		100,00 %	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			349.067.300	236.448.575	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	67,74 %	32,26 %
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen		12,00		100,00 %	

Sumber realisasi pada e-planing 2023

Berdasarkan tabel tersebut 6 (9,09 %) dari 66 sub kegiatan realisasi anggaran dibawah 50% yaitu kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar 38,01% dan kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industry rumah tangga sebesar 48,60%, sedangkan capaian kinerja 100% kegiatan diatas 65%.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.14 Analisis dan Solusi terhadap Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis keberhasilan /kegagalan	Solusi keberhasilan /kegagalan
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	76,54	76,84	100	Usia harapan hidup relatif tetap,hanya meningkat 0,30% karena angka kesakitan meningkat sehubungan <i>evoria</i> dengan pandemi covid 19 adanya perubahan pola perilaku	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peralihan new normal 2 Penerapan prokes dalam semua aspek 3 Penerapan PHBS dalam perilaku 4 Penguatan germas di lingkungan keluarga 5 Penguatan kegiatan testing, tracing ,treatment 6 Optimalisasi Vaksin, logistik booster 3 7 Peningkatan kapasitas petugas(SDM)
2		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100000 KH	52,78	82,67	43,36	Dibawah target artinya sudah tercapai, karena semakin rendah semakin baik capaiannya Kategori baik, dari 11 kasus , 10 kasus karena penyulit hamil bersalin dan nifas , 4 penyakit penyerta	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penguatan puskesmas dan jaringannya 2 Penguatan manajemen program dan sistem rujukan, pendegahan ibu hamil resiko tinggi 3 Peningkatan peran serta masyarakat persiapan pra konsepsi dan penjangangan kesehatan catin

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis keberhasilan /kegagalan	Solusi keberhasilan /kegagalan
3								<p>4 Penguatan kerjasama dan kemitraan</p> <p>5 Penguatan akselerasi dan inovasi dengan cara Optimalisasi aplikasi SI BULAN dalam rangka percepatan sistem rujukan terintegrasi aplikasi PSC 119</p> <p>6 Audit Kematian Ibu dan Bayi</p>
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	6,9	7,82	86,67	Melebihi target Kategori baik ,dari 104 kasus, disebabkan karena BBLR 31 %, Asfiksia 19,8 %, Kelainan kongenital 11,32 % .	7 Penerapan Buku KIA bayi kecil, manajemen BBLR di FKTP, orientasi manajemen terpadu bayi muda dan balita sakit
4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,8	0,8	100	<p>Kategori sangat baik, karena berdasarkan IKS termasuk keluarga sehat</p> <p>Kegiatan sudah dilakukan namun belum optimal.</p>	<p>1 Merencanakan peningkatan kapasitas pengelola program puskesmas dalam pengolahan dan integrasi data program dengan data PISPK (pertemuan)</p> <p>2 Bimbingan teknis secara intensif kepada 19 Puskesmas (Pembinaan terintegrasi oleh pembina Fasyankes tingkat Kabupaten)</p> <p>3 Update data secara off line secara rutin (untuk back up apabila terjadi kendala pada Aplikasi KS-Online)</p> <p>4 Penguatan intervensi lanjut dan kunjungan keluarga untuk peningkatan IKS</p>

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis keberhasilan /kegagalan	Solusi keberhasilan /kegagalan
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	%	100	100	100	Kategori sangat baik, karena secara kumulatif seluruh puskesmas sudah terakreditasi	Pendampingan secara berkala serta monitoring pelayanan secara berkesinambungan
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	91	58,60	64,40	Kategori baik, dengan nilai BB	1 Peningkatan dan perbaikan aspek penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja 2 Komitmen bersama serta penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektoral
							Kurangnya komitmen dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Reallisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat									
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah	85	95,83	112,74	23,753,476,032	20,475,905,115	86.20	28.57
2	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat (persentase pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita dan usia pelayanan dasar)	100	98,14	98,14	167,689,102,818	121,395,131,432	72.39	18.79

No	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
		Cakupan pelayanan pengendalian penyakit (persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif,usia lanjut, diabetes melitus, orang terduga ODGJ berat,orang terduga tuberkulosis, dan orang dengan resiko terinfeksi virus HIV	100	95,94	95,94	94,852,175,000	60,301,745,263	63.57	27.97
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan (persentase cakupan pelayanan dasar masyarakat, ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, pelayanan perijinan, sertifikasi dan pemetaan SDM Kesehatan)	92	100	100	3,314,064,907	846,463,338	25.54	54.41
					101,7	248.983.205.130	219.130.932.800	88,01	12,97

Berdasarkan tabel diatas tingkat efesiensi anggaran terhadap capaian kinerja pada tahun 2023 mencapai 12,97 %, meningkat sebesar 1,2 % dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 21,77 %. Hal ini didukung dengan ada program kegiatan dan sub kegiatan yang saling menunjang antar bidang dan seksi untuk tercapainya kinerja organisasi yang meliputi Indikator Kinerja Utama sesuai visi, misi serta peran fungsi organisasi, yang tergambar pada tabel berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah	112,74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah	112,74	Menunjang
	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	95,58	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil	99,07	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin	100	Menunjang
					Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir	98,94	Menunjang
					Persentase pelayanan kesehatan pada balita	92,68	Menunjang
					Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	Menunjang
					Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	91,05
				Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut		92,84	Menunjang
				Persentase pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi		93,24	Menunjang
				Persentase pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus		95,35	Menunjang
				Persentase pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ		92,33	Menunjang
		Persentase pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC	106,77	Menunjang			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
					Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi virus HIV	100	Menunjang
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan (persentase cakupan pelayanan dasar masyarakat, ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, pelayanan perijinan, sertifikasi dan pemetaan SDM Kesehatan)	96,14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pelayanan dasar masyarakat	100	Menunjang
persentase pelayanan perijinan dan sertifikasi					100	Menunjang	
persentase pemetaan SDM kesehatan					100	Menunjang	
Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90,18	Menunjang	

C. REALISASI ANGGARAN

Sumber daya anggaran merupakan unsur utama selain sumber daya manusia dalam menunjang pencapaian indikator kinerja. Peranan pembiayaan sangat berpengaruh terhadap penentuan arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kudus.

Adapun realisasi anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.116.906.204	74.412.099.657	89,53
1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259.801.800	186.186.474	71,66
1.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.299.500	77.846.074	90,20
1.2.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.502.300	108.340.400	62,44
1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78.967.703.500	70.442.633.090	89,20
1.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78.855.790.000	70.332.419.090	89,19
1.2.02.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.600.000	105.600.000	100,00
1.2.02.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.313.500	4.614.000	73,08
1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	19.003.000	38,01
1.2.05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	50.000.000	19.003.000	38,01

Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.817.040	559.956.700	99,32
1.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	356.000.000	354.677.900	99,63
1.2.06.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.392.000	50.007.000	99,24
1.2.06.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.268.000	20.263.000	99,98
1.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.177.240	57.270.000	98,44
1.2.06.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.455.800	15.348.500	93,27
1.2.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	4.200.000	100,00
1.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.324.000	58.190.300	99,77
1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.803.630.864	1.770.379.803	98,16
1.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.150.000	1.144.000	99,48
1.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	443.034.364	435.334.879	98,26
1.2.08.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.929.000	20.888.500	99,81
1.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.338.517.500	1.313.012.424	98,09
1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.471.953.000	1.433.940.590	97,42
1.2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	317.731.000	299.350.767	94,22
1.2.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.154.222.000	1.134.589.823	98,30
2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	161.138.314.216	140.561.263.824	87,23
2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.679.546.660	35.091.854.258	90,72
2.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	19.980.000	18.568.218	92,93
2.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.931.971.000	2.887.975.000	98,50
2.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.323.157.700	6.601.831.779	90,15
2.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	6.958.027.310	6.407.051.952	92,08
2.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	7.474.454.950	5.711.674.600	76,42
2.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	467.180.000	364.389.498	78,00
2.2.01.5 Pengembangan Rumah Sakit	1.260.152.000	1.205.004.400	95,62
2.2.01.9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	12.244.623.700	11.895.358.811	97,15
2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121.107.633.861	104.401.278.910	86,21
2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.536.995.800	1.452.538.420	94,51

2.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.749.900	95.449.900	94,74
2.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.754.570.000	162.580.500	9,27
2.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	625.067.000	578.445.680	92,54
2.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	109.362.000	72.168.000	65,99
2.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	10.000.000	6.200.000	62,00
2.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17.643.537.750	15.071.841.063	85,42
2.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	90.020.640	84.592.050	93,97
2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.340.069.825	1.290.914.515	96,33
2.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	372.170.700	355.038.000	95,40
2.2.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	425.481.000	398.609.700	93,68
2.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	715.016.000	539.979.840	75,52
2.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	9.999.900	9.999.900	100,00
2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	466.122.160	392.410.270	84,19
2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.982.311.840	39.346.790.900	85,57
2.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	83.092.500	38.994.900	46,93
2.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	190.331.000	160.561.820	84,36
2.2.02.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	221.058.500	205.807.215	93,10
2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	43.267.008.998	38.698.186.127	89,44
2.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	679.576.500	554.227.946	81,55
2.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	811.002.400	621.621.293	76,65
2.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	925.443.250	748.162.900	80,84
2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	67.712.000	46.529.050	68,72
2.2.02.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.365.491.800	1.333.052.380	97,62
2.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	181.700.700	169.000.700	93,01
2.2.02.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.912.500	4.490.000	91,40
2.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	52.000.000	44.999.875	86,54
2.2.02.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	848.177.900	781.151.616	92,10
2.2.02.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	670.457.000	619.036.000	92,33

2.2.02.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	113.062.898	102.103.950	90,31
2.2.02.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	286.321.400	269.604.400	94,16
2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	158.810.000	146.190.000	92,05
2.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	615.032.500	525.270.460	85,41
2.2.03.3 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	615.032.500	525.270.460	85,41
2.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	736.101.195	542.860.196	73,75
2.2.04.3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	418.993.595	320.239.776	76,43
2.2.04.4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	317.107.600	222.620.420	70,20
3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.394.122.100	1.303.985.920	93,53
3.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.394.122.100	1.303.985.920	93,53
3.2.03.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.394.122.100	1.303.985.920	93,53
4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	642.126.010	455.809.550	70,98
4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	282.831.550	188.607.100	66,69
4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	282.831.550	188.607.100	66,69
4.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	177.252.320	169.385.950	95,56
4.2.04.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	177.252.320	169.385.950	95,56
4.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	23.076.160	20.560.000	89,10
4.2.05.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	23.076.160	20.560.000	89,10
4.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	158.965.980	77.256.500	48,60

4.2.06.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	158.965.980	77.256.500	48,60
5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.691.736.600	2.397.773.849	89,08
5.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.937.506.000	1.774.191.564	91,57
5.2.01.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.937.506.000	1.774.191.564	91,57
5.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	272.504.300	254.933.710	93,55
5.2.02.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	272.504.300	254.933.710	93,55
5.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	481.726.300	368.648.575	76,53
5.2.03.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	481.726.300	368.648.575	76,53
Total	248.983.205.130	219.130.932.800	88,01

Berdasarkan data tersebut realisasi keuangan pada tahun 2023 sebesar 88,01 % meningkat 5% dibandingka tahun 2022 yaitu 201.112.056.438

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2022 merupakan capaian antara dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama, 5 (83,33%) indikator dengan kategori sangat tinggi.
3. Capaian kinerja berdasarkan indikator program 95,04% dengan tingkat efisiensi sebesar 12,97 %.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKjIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang memudahhi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).
3. Perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan lintas program yang efektif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan tahun berikutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311
Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Jabatan : BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH



Pihak Pertama,

dr ANDINI ARIDEWI, M.Kes

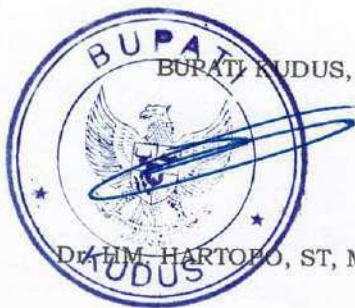
Pembina Tk. I

NIP. 197310082005012009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	100,00 %
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	76,54 Thn
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	52,78 per 100.000 kh
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi	6,90 per seribu
5	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,80 Angka
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	91,00 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.514.569.144	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	87.921.522.118	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.084.895.700	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	642.126.010	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.389.072.000	
TOTAL		172.552.184.972	



Dr. LIM. HARTOPO, ST, MM, MH



Dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pambina Tk. I
NIP. 197310082005012009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DARSONO, SKM, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : dr ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

dr ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197310082005012009

Kudus, 3 Januari 2023
Pihak Pertama,


DARSONO, SKM, MM
Pembina
NIP. 196803121989031006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100 %
2	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %
3	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100 %
	Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	60.025.692.863	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.025.692.863	
	TOTAL	60.025.692.863	

Kudus, 3 Januari 2023

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197310082005012009



DARSONO, SKM, MM
Pembina
NIP. 196803121989031006



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURYANTO, SKM, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : dr ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

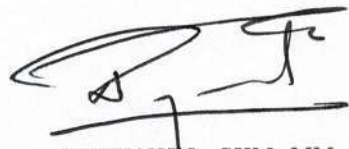
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

dr ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197310082005012009

Kudus, 3 Januari 2023
Pihak Pertama,


NURYANTO, SKM, MM
Pembina
NIP. 197205011993031004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen
2	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	18 %
4	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen
	Jumlah penyediaan fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	19 Puskesmas
	Jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	9 lokasi
	Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132 desa/kelu
	Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3 kali
	Jumlah desa siaga aktif mandiri	23 desa/kel

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	27.234.323.160	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.234.323.160	
2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	23.076.160	
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	23.076.160	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.389.072.000	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	767.500.400	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	272.504.300	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	349.067.300	
	TOTAL	28.646.471.320	

Kudus, 3 Januari 2023

KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197310082005012009



NURYANTO, SKM, MM
Pembina
NIP. 197205011993031004



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUGIARTO, SKM, M.Kes

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : dr ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

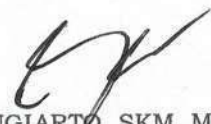
Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 3 Januari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

dr ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197310082005012009


SUGIARTO, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197109121994031004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS**

SEKRETARIS

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	85 indeks
2	Indeks kepuasan masyarakat	85 indeks
	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	18 dokumen
	Jumlah dokumen administrasi keuangan	12 dokumen
	Jumlah ASN yang meningkatkan kompetensinya	15 orang
	Jumlah laporan pengelolaan administrasi umum	7 laporan
	Jumlah laporan pengelolaan penyediaan jasa penunjang pada Dinas	4 laporan
	Jumlah laporan pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan	4 laporan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.514.569.144	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.901.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.802.523.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	517.573.280	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.736.753.864	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.266.817.000	
	TOTAL	81.514.569.144	

Kudus, 3 Januari 2023

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197310082005012009



SUGIARTO, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197109121994031004



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTEJO, SKM,MM
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : SUGIARTO, SKM, M.Kes
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUGIARTO, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197109121994031004

Kudus, 3 Januari 2023
Pihak Pertama,


SUTEJO, SKM,MM
Pembina
NIP. 196906081994031008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK


No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang
2	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket
3	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
4	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket
5	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
6	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket
7	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 dokumen
8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan
9	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
13	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit
14	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	356.000.000	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.294.000	
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.268.000	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.031.480	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.455.800	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.324.000	
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.150.000	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	443.034.364	
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.929.000	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.271.640.500	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	295.667.000	
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	971.150.000	
TOTAL		3.571.144.144	

SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS


SUGIARTO, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197109121994031004

Kudus, 3 Januari 2023
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
DINAS KESEHATAN


SUTEJO, SKM, MM
Pembina
NIP. 196906081994031008



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIDIK PURWANTO, S.Kep, Ners
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : SUGIARTO, SKM, M.Kes
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 3 Januari 2023

Pihak Pertama,

DIDIK PURWANTO, S.Kep, Ners

Penata Tk. I

NIP. 198102122011011006

Pihak Kedua,



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan
3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10430 orang/bulan
4	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
5	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.315.400	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.586.100	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77.690.610.000	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.600.000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.313.500	
TOTAL		77.943.425.000	

SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN



SUGIARTO, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197109121994031004

Kudus, 3 Januari 2023
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI,
PELAPORAN DAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN

DIDIK PURWANTO, S.Kep, Ners
Penata Tk. I
NIP. 198102122011011006



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. EDI KUSWORO
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : dr ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197310082005012009

Kudus, 3 Januari 2023
Pihak Pertama,

dr. EDI KUSWORO
Pembina
NIP. 197607062006041006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	92 persen
2	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	92 persen
3	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen
4	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen
	Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator
	Jumlah penyediaan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	21 lokasi
	Jumlah Rumah Sakit Tipe C dan D serta klinik yang memenuhi syarat perizinan	9 lokasi
	Jumlah laporan pengelolaan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM	2 laporan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	60.687.198.958	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.025.692.863	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	285.032.500	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	376.473.595	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.084.895.700	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.084.895.700	
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		0
	TOTAL	61.772.094.658	


Kudus, 3 Januari 2023

KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER
DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197310082005012009



dr. EDI KUSWORO
Pembina
NIP. 197607062006041006



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : APRI HADI SURYO PUTRO, S.KM
Jabatan : ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA/ MUDA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : dr ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

dr ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197310082005012009

Kudus, 3 Januari 2023
Pihak Pertama,


APRI HADI SURYO PUTRO, S.KM
Penata
NIP. 197904212007011012

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS**

ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA/ MUDA

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
1	Pengembangan Rumah Sakit	
	Terselenggaranya Rehabilitasi Gedung UPTD Laboratorium Kesehatan Menuju BSL 2	1 Paket
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
	Terselenggaranya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	1 Tahun
3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Jenis
4	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	867637 Penduduk
5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	32 Unit
6	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	32 Unit
7	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
	Jumlah Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang terlaksana	200 Rujukan


 KEPALA DINAS KESEHATAN
 dr. ARDIN LARDEWI, M.Kes
 Pembina Tk. I
 NIP. 197310082005012009

Kudus, 3 Januari 2023
 ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA/ MUDA
 DINAS KESEHATAN


APRI HADI SURYO PUTRO, S.KM
 Penata
 NIP. 197904212007011012

**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311
Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si

Jabatan : Pj. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si

20 Oktober 2023
Pihak Pertama,

dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197310082005012009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	100,00 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	91,00 Nilai
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	76,54 Thn
	Angka Kematian Ibu	52,78 per 100.000 kh
	Angka Kematian Bayi	6,90 per seribu
Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,80 Angka

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.116.906.204	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	91.779.943.318	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.084.895.700	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	642.126.010	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.426.072.000	
	TOTAL	178.049.943.232	





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311
Telp 438152 Fax 435030
email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. EDI KUSWORD
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197810082005012009

Kudus, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,

dr. EDI KUSWORD
Pembina
NIP. 197607062006041006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	92 persen
2	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	92 persen
3	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	93 persen
	Jumlah penyediaan fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	19 Puskesmas
	Jumlah pengelola industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan	120 IRT

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	27.351.740.160	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.351.740.160	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		0
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	282.831.550	
1	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	282.831.550	
TOTAL		27.634.571.710	

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 197310082005012009

Kudus, 23 Oktober 2023

KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN


dr. EDI KUSWORO
Pembina

NIP. 197607062006041006



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DARSONO, SKM, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197310082005012009

Kudus, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,

DARSONO, SKM, MM
Pembina
NIP. 196803121989031006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100 %
2	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %
3	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100 %
	Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.204.797.008	
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.204.797.008	
	TOTAL	4.204.797.008	

Kudus, 23 Oktober 2023

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN



Ldr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197310082005012009

DARSONO, SKM, MM
Pembina

NIP. 196803121989031006



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUGIARTO, SKM, M.Kes

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197310082005012009

Kudus, 23 Oktober 2023

Pihak Pertama,

SUGIARTO, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197109121994031004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN


No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	85 indeks
	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	18 dokumen
	Jumlah dokumen administrasi keuangan	12 dokumen
	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	15 orang
	Jumlah laporan pengelolaan administrasi umum	7 laporan
	Jumlah laporan pengelolaan penyediaan jasa penunjang pada Dinas	4 laporan
	Jumlah laporan pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan	4 laporan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.116.906.204	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259.801.800	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78.967.703.500	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.817.040	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.803.630.864	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.471.953.000	
	TOTAL	83.116.906.204	



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 DINAS KESEHATAN
 dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197310082005012009

Kudus, 23 Oktober 2023
 SEKRETARIS DINAS KESEHATAN


 SUGARTO, SKM, M.Kes
 Pembina Tk. I
 NIP. 197109121994031004



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YATIM NUGROHO, SKM

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : SUGIARTO, SKM, M.Kes

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

SUGIARTO, SKM, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 197109121994031004

Kudus, 23 Oktober 2023

Pihak Pertama,

YATIM NUGROHO, SKM

Penata Tk. I

NIP. 197404011995031003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**

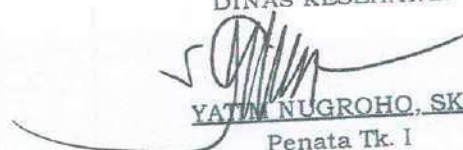
KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang
2	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket
3	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket
4	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket
5	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
6	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket
7	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 dokumen
8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan
9	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
13	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit
14	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	356.000.000	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.392.000	
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.268.000	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.268.000	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.177.240	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.455.800	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.200.000	
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.324.000	
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.150.000	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.150.000	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	443.034.364	
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.929.000	
	TOTAL	3.889.400.904	



Kudus, 23 Oktober 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
DINAS KESEHATAN


YATIN NUGROHO, SKM
 Penata Tk. I
 NIP. 197404011995031003



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIDIK PURWANTO, S.Kep, Ners

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : SUGIARTO, SKM, M.Kes

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



SUGIARTO, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197109121994031004

Kudus, 23 Oktober 2023

Pihak Pertama,

DIDIK PURWANTO, S.Kep, Ners

Penata Muda Tk. I

NIP. 198102122011011006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan
3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10430 orang/bulan
4	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
5	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.299.500	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.502.300	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78.855.790.000	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.600.000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.313.500	
TOTAL		79.227.505.300	



DIDIK PURWANTO, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197109121994031004

Kudus, 23 Oktober 2023

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN
KEUANGAN
DINAS KESEHATAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DIDIK PURWANTO'.

DIDIK PURWANTO, S.Kep. Ners
Penata Muda Tk. I
NIP. 198102122011011006



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURYANTO, SKM, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197310082005012009

Kudus, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,

NURYANTO, SKM, MM
Pembina
NIP. 197205011993031004